



Bongkar Kasus UPS

Abraham Lunggana Siap Diperiksa Polisi

Pada Rabu (29/4), penyidik Bareskrim Polri memanggil mantan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan, untuk pemeriksaan. Penyidik sedianya juga memeriksa mantan koordinator Komisi E yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Abraham "Lulung" Lunggana.

Meski demikian, hingga kemarin Lulung belum menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Lulung, Ramdan Alamsyah, membantah kliennya sudah mendapat surat panggilan. "Kami datang (ke Bareskrim) justru untuk memastikan kapan pemanggilan itu. Akhirnya, pemeriksaan (Lulung) dijadwalkan besok (Kamis) siang," ujarnya.

Fahmi dan Lulung tidak hadir pada pemanggilan pertama, Senin (27/4). Menurut Ramdan, kliennya telah melayangkan surat ke penyidik perihal ketidakhadiran Lulung. Alasannya, Lulung harus menghadiri acara partai di Manado, Sulawesi Utara.

Menurut Fahmi, Lulung siap memenuhi panggilan pemeriksaan polisi yang dijadwalkan Kamis ini. Dia juga siap membantu penyidik mengungkap data dan seluk-beluk pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) tahun 2014.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, untuk memperjelas kasus ini penyidik akan memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta.

Anton mengingatkan, pemanggilan saksi bersifat wajib. Jika seseorang tidak memenuhi panggilan, berarti dia tidak kooperatif. Di Balai Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Lulung membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. "Pasti dia (Lulung) senang dong (diperiksa penyidik). Kan, selama ini ingin buka-bukaan," katanya.

Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), pengadaan UPS tahun 2014 sarat persekongkolan. Sejumlah pihak yang diduga terlibat antara lain pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 186,4 miliar

Persekongkolan terutama diduga terkait penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang. Dalam penetapan HPS, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang.

Selain itu, HPS juga diduga digelembungkan demi keuntungan distributor dan pemenang lelang. HPS digunakan untuk menilai kewajaran penawaran harga yang disampaikan perusahaan peserta lelang.

Pada pengadaan 49 unit UPS, sebagaimana temuan ICW, PPK menetapkan HPS hanya berdasarkan harga dari tiga distributor, yakni PT IMM untuk merek Philotea, PT DCA untuk merek Kehua Tech, dan PT OA untuk merek AEC/ALP. Ketiga distributor itu memasok perusahaan peserta dan pemenang tender.

Sebagaimana proyek pengadaan mesin pencetak dan pemindai yang juga dilaporkan ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para pemenang lelang UPS dinilai tidak memenuhi kualifikasi. Mereka dianggap tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.

Tak terganggu

Menanggapi pemanggilan sejumlah anggota Dewan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik memastikan kinerja jajarannya tidak terganggu. Koordinasi antar-anggota tetap berjalan dengan baik.

"Memang ada kemungkinan beberapa anggota yang lain akan dipanggil juga. Namun, sejauh ini Dewan tetap bekerja seperti biasa," kata Taufik, kemarin.

Taufik mengakui, ada sejumlah anggota Komisi E yang bisa saja ikut dipanggil karena mereka duduk di komisi tersebut pada periode lalu. Begitu pula pemanggilan terhadap anggota Komisi E periode lalu yang sekarang duduk di komisi lain.

Menurut Taufik, pemanggilan oleh kepolisian untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS merupakan prosedur yang harus dijalani. "Ini dalam rangka penegakan hukum. Sebagai warga negara yang patuh hukum, asal semua sesuai dengan prosedur, mereka harus datang. Semua tetap harus terbuka," katanya.

Anggota Komisi E, Ashraf Ali, menolak berkomentar lebih jauh soal pemanggilan beberapa anggota Dewan oleh Bareskrim Polri. "Nanti saja, ya," katanya.

Ashraf, yang berasal dari Partai Golkar, juga duduk di Komisi E pada periode lalu.

Pada akhir Maret 2015, penyidik menetapkan dua tersangka kasus tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Sulaiman. Keduanya bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen pada proyek itu. (FRO/MKN/B12)